

# IMPLEMENTASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN (KECAKAPAN) HIDUP DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR

oleh: Dwi Sugianto

**ABSTRAK** : Perubahan kebijakan WAJAR dari 6 tahun menjadi 9 untuk menyesuaikan dengan tantangan dalam kehidupan masyarakat global. Dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka setiap warga Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tingkat SLTP. Pendidikan dasar 9 tahun, pada prinsipnya memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh bekal pengetahuan dan kecakapan baik untuk melanjutkan studi maupun untuk dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang tidak melanjutkan studi. Seiring dengan otonomi pendidikan dan diberlakukannya KTSP, sekolah mengembangkan program muatan lokal untuk memberikan pendidikan keterampilan/kecakapan hidup. Disamping itu sekolah juga mendapatkan kewenangan mengembangkan perpustakaan sekolah sebagai input pendidikan. Pengembangan perpustakaan sekolah menggunakan pendekatan *education production function* atau *input output analysis*.

**Kata kunci:** pendidikan dasar, keterampilan/kecakapan hidup, dan perpustakaan sekolah

## Pendahuluan

Dua fenomena yang dihadapi bangsa Indonesia, baik secara kelompok maupun perorangan antara lain: 1). Berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, pertokoan dan perkantoran serta fungsi lainnya. Yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan pertanian. Menyempitnya lahan pertanian berdampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat. Kebutuhan hidup masyarakat yang tadinya dapat tercukupi dengan bertani, berubah ke berbagai bidang. 2). Perkembang teknologi komunikasi dan informasi dalam masyarakat global, yang berdampak pada tumbuhnya pasar bebas, menjadikan anggota masyarakat secara individu maupun kelompok dituntut memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dimilikinya spesifikasi pengetahuan dan keterampilan, diharapkan individu maupun kelompok masyarakat memiliki daya saing yang baik dalam berkompetisi secara global untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menghadapi dua fenomena tersebut di atas, setiap individu dituntut memiliki spesifikasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemerintah berusaha memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun ditempuh anak 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Dengan kebijakan wajib belajar 9

tahun, maka setiap warga Indonesia akan memiliki pendidikan minimal tingkat SLTP. Selanjutnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masuk pada tingkat pendidikan dasar.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, berusaha membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Untuk memiliki kompetensi yang diperlukan baik untuk melanjutkan maupun bagi mereka yang tidak melanjutkan studi kejenjang berikutnya. Terdapat beberapa SMP, disamping memfasilitasi peserta didik memperdalam berbagai bidang studi sesuai standar isi kurikulum, juga membelajarkan keterampilan sebagai muatan lokal yang bobotnya berbeda antara sekolah satu dengan yang lain.

Penulis melakukan survei ke tiga satuan lembaga pendidikan SMP negeri berstatus Standar Sekolah Nasional (SSN) di kota Malang. Ke tiga sekolah tersebut antara lain: SMP negeri 10, SMP negeri 13, dan SMP Negeri 19. Dengan survey tersebut, penulis berusaha menggali informasi tentang penyelenggaraan muatan lokal dan sejauh mana perpustakaan sekolah berperan. Dengan diberlakukannya KTSP, ke tiga sekolah berusaha memfasilitasi peserta didiknya mengembangkan kompetensi baik yang diperlukan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya maupun bagi mereka yang tidak melanjutkan. Untuk membekali peserta didik dalam bidang keterampilan, sekolah menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi sekolah. Karena perbedaan kondisi dan karakter, ke tiga sekolah tersebut mengembangkan program muatan lokal berbeda-beda.

SMP Negeri 19 Malang merupakan sekolah alih fungsi dari Sekolah Teknik Negeri Malang (setingkat SMP/SLTP). Pengalihan fungsi ini didasarkan pada Surat Edaran dari DIRJENDIKDASMAN DAN DIRDIKMENJUR, Nomor:1356/C4/O/92, tanggal 08 Mei 1992. Peserta didik SMP Negeri 19, tidak semuanya melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Berorientasi dari latar belakang sekolah (Sekolah Teknik) dan tidak semua peserta didiknya melanjutkan studi, serta tersedianya tenaga pengajar bidang teknik keterampilan, SMP Negeri 19 Malang menjadikan pendidikan keterampilan (muatan lokal) sebagai program unggulan dengan tetap membelajarkan berbagai bidang studi sebagai bekal untuk melanjutkan studi ke SLTA. Bidang keterampilan yang dibelajarkan kepada peserta didik meliputi keterampilan: pengerjaan logam, kelistrikan, kerajinan, kerumahtanggaan dan kepariwisataan.

SMP Negeri 10 dan 13 Malang, peserta didiknya memiliki motivasi besar untuk melanjutkan studi ke jenjang SLTA baik SMA maupun ke SMK. Program pendidikan yang diselenggarakan lebih menekankan untuk memfasilitasi peserta didiknya untuk melanjutkan studi ke SLTA. Pendidikan keterampilan (muatan lokal) yang diselenggarakan di SMP Negeri 10 antara meliputi keterampilan tata boga dan keterampilan elektro dengan didukung prasarana dan sarana laboratorium yang memadai. Kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik bidang tata boga, mereka dapat menunjukkan gagasan, berupa resep masakan dan mendemonstrasikan memasak serta hasil masakannya.

Sedang pendidikan keterampilan yang diselenggarakan di SMP Negeri 13 meliputi bidang keterampilan: tata boga, tata busana dan otomotif. Pembelajaran bidang tata boga dan busana, mengingat ketersediaan tenaga pengajar, pelaksanaannya bekerja sama dengan SMK negeri 3 Malang.

Dengan penyelenggaraan pembelajaran berbagai bidang studi pokok (mata pelajaran) dan muatan lokal, diharapkan peserta didik memiliki kesiapan melanjutkan studi dan memiliki keterampilan hidup (kecakapan) sebagai bekal untuk memasuki kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang tidak melanjutkan.

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* (Depdiknas, 2001: 3). Perpustakaan merupakan salah satu input lembaga pendidikan. Kalau penyelenggaraannya dianalisis sesuai dengan kebutuhan, maka perpustakaan akan berperan secara maksimal dalam pencapaian program pendidikan sekolah. Peran perpustakaan sekolah dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran muatan lokal, dari ketiga sekolah tersebut masih tergolong kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik. Koleksi yang tersedia di perpustakaan dalam bidang keterampilan masih belum sesuai dengan kebutuhan sumber belajar yang relevan. Sumber belajar yang tersedia di perpustakaan didapatkan dari hadiah *droping* dari dinas terkait dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik untuk memiliki keterampilan (kecakapan) sebagai bekal hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pemakainya. Darmono (2001, 135) bahwa “Layanan perpustakaan harus bertumpu pada landasan pemikiran yaitu: untuk apa layanan diberikan, kepada siapa layanan diberikan, dalam situasi lingkungan bagaimana perpustakaan tersebut diberikan, serta strategi apakah yang digunakan dalam memberikan layanan tersebut”. dalam kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yang sangat perlu diperhatikan dari ke empat landasan pemikiran tersebut adalah “Untuk apa layanan diberikan?”. Bertolak dari landasan pemikiran ini, yang perlu diperhatikan secara cermat adalah bagaimana mengadakan koleksi dan bagaimana layanan perpustakaan diselenggarakan agar kebutuhan pemakai dapat terpenuhi secara efektif? Kebutuhan pemakai dapat berupa pengembangan keterampilan intelektual dan pengembangan strategi kognitif serta keterampilan/kecakapan hidup.

Penulisan ilmiah ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi penyelenggaraan perpustakaan sekolah dalam yang mendukung terselenggaranya pendidikan (pembelajaran) keterampilan/kecakapan hidup bagi peserta didik di tingkat pendidikan dasar (SMP/ SLTP)? Untuk memperoleh pemahaman yang sama antara penulis dengan pembaca, penulis mengajak pembaca mengkaji terlebih dulu tentang pendidikan dasar, pendidikan (pembelajaran) keterampilan hidup, penyelenggaraan layanan perpustakaan sekolah.

## **Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar merupakan program pendidikan minimal yang wajib ditempuh oleh semua warga negara Indonesia baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Dalam lingkup formal, pendidikan dasar ini semula wajib ditempuh setiap warga negara Indonesia selama 6 tahun, yaitu di tingkat Sekolah Dasar (SD). Seiring dengan pesatnya kemajuan IPTEK, setiap individu dituntut mengembangkan pengetahuannya sebagai bekal berinteraksi dalam kehidupan global. Karena tuntutan dalam kehidupan masyarakat global, kewajiban belajar bagi warga negara Indonesia mengalami perubahan. Perubahan kebijakan bidang pendidikan dasar (wajib belajar) tertuang dalam UU No 2 tentang Sistem pendidikan Nasional 1989, adalah “berubahnya kebijakan Pendidikan Nasional, khususnya pendidikan dasar yang pada mulanya belangsung 6 tahun menjadi 9 tahun. Artinya setiap warga negara Indonesia minimal berpendidikan SLTP” (Hasbullah, 2005: 136). Dengan kewajiban belajar 9 tahun, diharapkan setiap warga Indonesia memiliki bekal pengetahuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK dalam kehidupan masyarakat global. Bekal pengetahuan yang diperoleh individu melalui program wajib belajar 9 tahun, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kebijakan yang menetapkan setiap warga negara Indonesia minimal berpendidikan setingkat SLTP, berimplikasi pada terjadinya alih fungsi pendidikan kejuruan tingkat SLTP. Sebelum ditetapkannya wajib belajar 9 tahun, di tingkat SLTP terdapat sekolah kejuruan, yang antara lain: Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan lainnya. Sejak bulan Mei 1992, semua Sekolah Teknik setingkat SLTP harus melakukan perubahan fungsi. Yang semula pendidikan sekolah tersebut secara khusus memfasilitasi peserta didik memiliki berbagai keterampilan, berubah fungsi mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke SLTA. Pengalihan fungsi ini didasarkan pada Surat Edaran dari DIRJENDIKDASMEN DAN DIRDIKMENJUR, Nomor:1356/C4/O/92, tanggal 08 Mei 1992. Hasbullah (2005: 125) “Sejak tanggal 2 Mei 1994, Presiden Soeharta menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia minimal berpendidikan setingkat SLTP (pendidikan dasar). Sejak saat itulah dicanangkan wajib belajar 9 tahun, yang ditempuh di SD 6 tahun (usia 7 – 12 tahun) dan SLTP 3 tahun (usia 13 – 15 tahun)”.

UU No 20 tahun 2003 pasal 17 butir 1 dan 2 dijelaskan (Hamid, 2003: 10)

“Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”.

Lebih lanjut pengertian WAJAR 9 tahun yang dijelaskan pada PP Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 pasal 1:

“WAJAR merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”

Wajib belajar 9 tahun yang diselenggarakan sampai pada tingkat SLTP (SMP/MTs. atau yang sederajat) yang pada prinsipnya memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh bekal pengetahuan dan kecakapan baik untuk melanjutkan studi maupun untuk dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang tidak melanjutkan studi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 pasal 2, wajib belajar:

“berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”

Memperhatikan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah dapat kita lihat adanya dua sasaran yang ingin dicapai, yaitu pembekalan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melalui kehidupan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam kenyataan, tidak semua lulusan pendidikan dasar melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Menurut Widayati (2002: 82) “sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mendapat tugas paling penting dalam seluruh jenjang pendidikan. Karena pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah, seharusnya ditumbuh kembangkan sikap dan jiwa aktif, kritis, kreatif dan kemandirian”.

Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang diinginkan, kebijakan Wajib Belajar 9 tahun (pendidikan dasar) diselenggarakan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman belajar yang sesuai dengan 4 pilar pendidikan yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu: 1) Learning to know (belajar untuk memahami dan memperoleh pengetahuan). Belajar untuk membangun pemahaman dan pengetahuan terhadap lingkungan sekitar; 2). Learning to do (belajar untuk berbuat kreatif). Belajar dengan pengalaman/ berbuat kreatif/melakukan; 3). Learning to live together (belajar hidup dalam kebersamaan ). Belajar dalam kebersamaan/ berinteraksi dengan individu maupun kelompok secara bervariasi; Dan 4). Learning to be (belajar menjadi diri sendiri/belajar mengekspresikan diri berdasarkan: potensi, pemahaman, kreativitas dan kebersamaan). Belajar untuk memiliki kemampuan mengekspresikan diri berdasarkan pemahaman, kreativitas dalam kebersamaan/memahami diri sendiri dan membangun kepercayaan diri/menjadi diri sendiri. Dari keempat pilar pendidikan tersebut, lebih diarahkan memfasilitasi peserta didik berkembang menjadi diri sendiri (*learning to be*). Yaitu peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya yang pada akhirnya mampu secara mandiri bereksistensi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan empat pilar yang ditetapkan UNESCO, diharapkan lembaga pendidikan dasar secara efektif menghasilkan lulusan yang mampu mandiri sesuai dengan tuntutan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak yang berkepentingan (*stake holders*). Untuk mampu menghasilkan lulusan yang diinginkan, penyelenggaraan pendidikan dasar menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-out put analysis*. DEPDIKNAS (2001: 3) “pendekatan *education production function* atau *input-out put analysis* melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (*uotput*) secara otomatis akan terjadi”.

Kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu input pendidikan berperan sebagai instrumental yang mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun yang dikembangkan, diharapkan mampu mengantarkan peserta didik memiliki bekal pengetahuan dan kecakapan yang bermanfaat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Seiring dengan kebijakan otonomi pendidikan dan diberlakukannya KTSP, sekolah diberi kewenangan mengembangkan kurikulum sesuai dengan karaktersitik dan kondisi sekolah, daerah dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh BNSP.

Disamping mengembangkan kurikulum, sekolah juga mendapat kewenangan memberdayakan dan mengembangkan sumber belajar, alat-alat pelajaran dan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Perpustakaan sekolah sebagai input memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kelancaran proses dan pencapaian tujuan pembelajaran (pendidikan) perlu dikembangkan secara maksimal. Pengembangan perpustakaan sekolah dilakukan secara maksimal dengan menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-out put analysis* untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan empat pilar pendidikan. Demikian besar peran perpustakaan sekolah dalam mendukung keberhasilan kebijakan wajib belajar 9 tahun, melalui UU no 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1 pemerintah menetapkan, “bahwa setiap pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

### **Pendidikan Keterampilan/Kecakapan Hidup**

Pengertian pendidikan menurut UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan, “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Keterampilan yang dalam pengertian tersebut memiliki makna tidak hanya keterampilan motorik saja. Tetapi juga termasuk pada strategi kognitif, yaitu kemampuan menerapkan keterampilan intelegensi (pemahamannya) terhadap berbagai konsep dan prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan individu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendidikan merupakan proses membantu peserta didik mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tuntutan atau kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki kemampuan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memiliki kemampuan mandiri, masing-masing peserta didik melalui proses pendidikan terfasilitasi mengembangkan keterampilan (kecakapan) sebagai bekal bereksistensi dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendidikan kecakapan hidup adalah proses membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik yang bersangkutan mampu, sanggup dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang.

Keterampilan hidup merupakan berbagai macam keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk mampu hidup mandiri dalam memenuhi kehidupan bermasyarakat. Keterampilan hidup tidak terbatas pada keterampilan motorik saja, tetapi memiliki makna yang lebih luas yaitu dalam bentuk kecakapan. UU No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 (Hamid, 2003: 47) “pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri”. Kecakapan juga dapat diartikan sebagai kecerdasan/ kemampuan individu secara mandiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Gardner (Baharuddin, : 2008: 146-147) “bahwa kecerdasan/ kemampuan seseorang diukur bukan dengan tes tertulis, tetapi bagaimana seseorang dapat memecahkan problem nyata dalam kehidupan”. Oleh Gardner kemampuan ini disebut intelegensi bila menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Sebagai contoh kemampuan interpersonal. Dengan kemampuan interpersonal, seseorang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan hubungan dengan orang lain.

Setiap individu pada prinsipnya memiliki berbagai macam kecerdasan/kemampuan, tetapi hanya satu atau beberapa kemampuan saja yang lebih menonjol. Kemampuan/kecerdasan yang menonjol itulah yang perlu dikembangkan oleh individu melalui proses pendidikan (pembelajaran). Menurut Gardner (Baharuddin, 2008: 147) bahwa “kemampuan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kecedasan, terdiri dari: 1). Intelegensi linguistik (*linguistik intelegence*), yaitu kemampuan menggunakan kata-kata, kalimat baik lisan maupun tertulis untuk memnyampaikan gagasan; 2). Integegensi matematis-logis (*logic-matetaical intelegensi*), yaitu kemampuan menggunakan bilangan dan logika. Kemampuan ini berupa kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan; 3). Intelegensi ruang (*spatial intelegence*), yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat seperti yang dimiliki oleh navigator, dekorator, pemburu dan arsitek; 4). Intelegensi kinestetik-badani (*bodily-kinesthetic intelegence*), yaitu kemampuan seseorang secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Seperti: olah raga dan menari; 5). Intelegensi musikal (*musical intelegensi*), yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik dan suara; 6). Intelegensi interpersonal (*interpersonaly intelegence*), yaitu kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan orang lain; 7). Intelegensi intra-personal (*intrapersonaly intelegence*), yaitu kemampuan berefleksi dan menyeimbangkan diri, mempunyai kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan, mempunyai kemampuan mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidup, dan dapat mengendalikan emosi dan beradaptasi sehingga lebih tenang dalam menghadapi permasalahan; 8). Intelegensi lingkungan/natural (*natural intelligence*), kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memahami dan menikmati alam dan menggunakannya secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan akan alam; dan 9). Itelegensi eksistensial (*existential intelegence*), yaitu kecakapan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia”. Sedang menurut Slamet (2002) “kecakapan hidup mencakup **kecakapan dasar** dan **kecakapan instrumental**. Kecakapan dasar meliputi: 1) kecakapan dasar mandiri, 2) kecakapan membaca, menulis dan berhitung, 3) kecakapan berkomunikasi, 4) kecakapan berpikir ilmiah, kritis nalar, rasional, lateral, sistem,kreatif, eksploratif, reasoning, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, 5) kecakapan kalbu/personal, 6) kecakapan mengelola raga, 7) kecakapan merumuskan kepentingan dan upaya-upaya untuk mencapainya, 8) kecakapan berkeluarga dan sosial. Kecapan istrumental meliputi: 1) kecakapan memanfaatkan teknologi; 2) kecakapan mengelola sumber daya; 3) kecapakan bekerja sama dengan orang lain; 4) kecakapan memanfaatkan informasi, 5) kecakapan menggunakan sistem; 6) kecakapan berwira usaha; 7) kecakapan kejuruan; 8) kecakapan memilih dan mengembangkan karir; 9) kecakapan menjaga harmoni dengan lingkungan; dan 10) kecakapan menyatukan bangsa”.

Demikian banyak berbagai kecakapan/keterampilan yang dimiliki individu, guru/pendidik perlu memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk mengetahui kecakapan



paling menonjol yang dimiliki. Gardner (Eefndi, 2005: 118) menyatakan “ setiap individu memiliki semua jenis kecerdasan diatas, tetapi hanya satu atau lebih yang menonjol, kecerdasan yang lain berada dalam standar minimal”. Dengan peserta didik mengetahui kecapakan menonjol yang dimiliki, diharapkan mereka akan tumbuh motivasi belajar secara internal. Tumbuhnya motivasi internal, akan memudahkan guru dalam memfasilitasi peserta didik mengembang-kan keterampilan/kecakapan hidup untuk mampu secara mandiri men-jadi anggota masyarakat sejahtera. Pendidikan keterampilan/kecakapan hidup dikembang-kan oleh setiap satuan pendidikan melalui pengembangan program muatan lokal.

Muatan lokal merupakan bagian kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah yang materinya tidak dapat dikemlompok ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan dan dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan yang tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Sehingga pengembangannya lebih menekankan relevansinya dengan kebutuhan peserta didik, pihak terkait dengan lulusan, keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

### **Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Sekolah**

Kehadiran perpustakaan sekolah berperan besar dalam mendukung tercapainya tujuan program pendidikan (pembelajaran). Dengan berbagai koleksi yang disediakan, pemustaka dapat menggunakannya sesuai dengan minatnya. Sedang bagi guru, perpustakaan dapat membantu tersedianya sumber belajar yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan pembelajaran berlangsung efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian penting kehadiran perpustakaan sekolah, melalui UU no 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1 pemerintah menetapkan, “bahwa setiap pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Penyelenggaraan perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah diharapkan dapat , menjadi wahana belajar peserta didik dalam mengembangkan potensinya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah menurut UU RI No 43 Tahun 2007 antara lain: 1). Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan; 2). Perpustakaan wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; 3). Perpustakaan mengembangkan koleksi lain yang mendukung

pelaksanaan kurikulum pendidikan; 4). Perpustakaan melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; 5). Perpustakaan sekolah/ madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 6). Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal pengembangan perpustakaan .

Seiring dengan pemberian otonomi sepenuhnya kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan diberlakukannya KTSP, sekolah diberi keleluasaan mengatur dan memberdayakan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan system pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebijakan system pendidikan nasional, perlu didukung oleh berbagai input yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masing-masing sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu input proses pendidikan, mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan disamping memperhatikan pada hasil yang dicapai, juga lebih menekankan pada proses penyelenggaraan baik yang dilakukan guru maupun peserta didiknya. Sumantri (2006), bahwa “keberhasilan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada peserta didik, petugas, sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud adalah perpustakaan sekolah”. Ketergantungan proses pendidikan kepada perpustakaan sekolah dalam mencapai tujuan, karena perpustakaan sekolah menyimpan, melestarikan dan menyajikan koleksi pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat mencerdaskan pemakainya (pembaca). Sehingga perpustakaan sekolah perlu dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun guru, agar secara efektif menunjang pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Karena berperan penting dalam proses pembelajaran, penyelenggaraan perpustakaan sekolah dapat dikategorikan sebagai salah input yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan program pendidikan sekolah (visi dan misi), kebutuhan guru dan peserta didik.

Perpustakaan sebagai salah satu input program pendidikan sekolah, dalam mengembangkan harus dianalisis sesesuai dengan program pendidikan, kebutuhan guru maupun peserta didik. Pengembangan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan,

diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai sumber belajar dalam mengembangkan kreativitasnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedang bagi peserta didik, bermanfaat sebagai sumber belajar dalam menggali konsep-konsep berbagai mata pelajaran, menambah wawasan dan pemahaman, serta sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan keterampilan (kecakapan) hidup sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tuntutan masyarakat sekitarnya.

Pengembangan koleksi merupakan kegiatan pelayanan teknis yang dilakukan perpustakaan untuk menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemakai dalam mencapai tujuan. Peran pengembangan koleksi oleh perpustakaan ini antara lain: mendukung, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pendidikan lembaga induknya. Pengembangan koleksi merupakan salah satu kegiatan perpustakaan yang berperan penting juga dalam mendukung keberhasilan program pendidikan keterampilan/kecakapan hidup. Karena memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pendidikan kecakapan/ keterampilan hidup, pengembangan koleksi perpustakaan harus mengandung unsur-unsur: 1) Menumbuhkan hasrat keingintahuan peserta didik; 2). Mengembangkan imajinasi peserta didik; 3). Menumbuhkan inisiatif bagi peserta didik; 4). Mengandung segi-segi kreatif; 5). Menjadi sumber belajar dalam mengembangkan keterampilan intelektual dan kecakapan/kecerdasan yang dapat menumbuhkan kemandirian; 6). Berisi unsur-unsur estetika yang cukup tinggi; 7). Menumbuhkan budaya dan disiplin yang tinggi, dan 8). Mengandung pesan nilai-nilai moral. Carter dan Bonk (LPPI, 2000: 25) “pembinaan dan pengembangan koleksi perpustakaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum: 1). Koleksi harus dipilih dengan tepat sesuai kebutuhan pengguna tanpa membedakan ras, kebangsaan, profesi, atau lokasi pengguna; 2). Koleksi harus dikembangkan berdasarkan rencana; 3). Koleksi yang akan disediakan harus berkualitas, baik isi, penyajian dan format, kepengarangan, subyek, maupun fakta nyata”.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keterampilan/kecakapan hidup, pengembangan koleksi tentunya berorientasi minat pengembangan potensi peserta didik baik sebagai bekal melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi, maupun memasuki kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang tidak melanjutkan.

### **Implementasi Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Pendidikan Keterampilan/Kecakapan Hidup**

Bertolak dari “Untuk apa layanan perpustakaan diberikan dan pendekatan penyelenggaraan pendidikan *“education production function atau input-uotput analysis”*”, dalam implementasi pengembangan penyelenggaraan perpustakaan harus dianalisis sesuai dengan: 1) karakteristik dan kondisi sekolah, 2) tujuan pendidikan, dan 3) kebutuhan peserta didik dan guru. Implementasi pengembangan perpustakaan sekolah dalam pendidikan-an keterampilan hidup, mencakup bidang pengembangan koleksi dan pengembangan layanan pemakai

## 1. Pengembangan koleksi

Tersedianya sumber belajar (buku teks, majalah dan dalam bentuk lain) di sekolah, diharapkan kegiatan pendidikan (pembelajaran) dapat terselenggara dengan baik, sehingga efektif bagi guru maupun peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengembangan koleksi perpustakaan (sumber belajar) perlu memperhatikan pendekatan “*educational production function atau input-output analysis*”. Pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi, kalau semua input dianalisis sesuai dengan kebutuhan, maka proses pendidikan akan efektif menghasilkan lulusan yang diinginkan. Lulusan yang diinginkan dalam hal ini adalah menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan / keterampilan hidup. Pengembangan koleksi merupakan salah satu kegiatan perpustakaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pendidikan keterampilan/kecakapan hidup. Pengembangan koleksi dianalisis sesuai dengan kebutuhan sehingga perpustakaan sebagai input pendidikan dapat memfasilitasi sekolah menghasilkan produk yang diinginkan. Terkait dengan pendidikan keterampilan/ kecakapan hidup, beberapa hal yang dilakukan, antara lain:

- a. Berkerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*) mengidentifikasi berbagai kecakapan/keterampilan hidup yang harus dimiliki peserta didik sesuai dengan tuntutan lingkungan dan kondisi masyarakat sekitar
- b. Mengidentifikasi berbagai kecakapan hidup yang diminati peserta didik
- c. Mengidentifikasi ketersediaan sumber belajar (buku, majalah) baik melalui katalog maupun toko buku
- d. Mengadakan koleksi tidak hanya dari droping pemerintah, tetapi bekerjasama dengan *stake holders* dalam mengadakan koleksi yang mencakup semua bidang kecakapan, sesuai dengan pendapatnya Gardner maupun Slamet, agar sesuai dengan kecakapan/ keterampilan yang diminati peserta didik

## 2. Pengembangan layanan pemakai

Layanan pemakai tidak hanya sebatas penyajian, peminjaman, dan membaca, tetapi ditindak lanjuti dengan pemberian fasilitas mempraktekan bidang kecakapan hidup yang telah dipelajari melalui koleksi perpustakaan. Mengembangkan layanan pemakai tetap memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik baik guru yang dimiliki sekolah maupun anggota masyarakat yang dapat membelajarkan sesuai dengan bidang kecakapan/ keterampilan hidup, waktu dan sarana-prasarana.

## Kesimpulan

Berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, pertokoan dan perkantoran serta fungsi lainnya dan berkembang teknologi komunikasi dan informasi dalam masyarakat global, menuntut warga Indonesia baik secara individu memiliki spesifikasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk memfasilitasi individu memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, pemerintah menetapkan kebijakan WAJAR 9 yang ditempuh 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP (SMP). Dengan Kebijakan Wajar 9 tahun maka semua warga negara Indonesia minimal harus berpendidikan dasar SLTP atau yang sederajat. Wajib belajar 9 tahun yang diselenggarakan sampai pada tingkat SLTP (SMP/MTs. atau yang sederajat) yang pada prinsipnya memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh bekal pengetahuan dan kecakapan baik untuk melanjutkan studi maupun untuk dapat mandiri dalam kehidupan bermasyarakat bagi mereka yang tidak melanjutkan studi. Untuk memfasilitasi peserta didik memiliki bekal pengetahuan dan kecakapan melanjutkan studi maupun kemampuan mandiri bagi mereka yang tidak melanjutkan studi, pada jenjang pendidikan dasar dilaksanakan pendidikan keterampilan/kecakapan hidup. Pendidikan keterampilan/kecakapan hidup dilaksanakan melalui program pendidikan muatan lokal. Keberhasilan program muatan lokal sangat ditentukan oleh berbagai input pendidikan, yang satu diantaranya adalah penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Agar efektif mendukung keberhasilan program pendidikan muatan lokal, penyelenggaraan perpustakaan sekolah berorientasi pada pendekatan pendidikan “*educational production function atau input-output analysis*”. Pendekatan “*educational production function atau input-output analysis*”, dalam perpustakaan dilaksanakan bekerjasama dengan stake holders sehingga koleksi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yakni memfasilitasi peserta didik memperoleh dan mengembangkan keterampilan/kecakapan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2006, Pendidikan Kecakapan Hidup = Life Skill Education, Bandung: Alfabeta
- Bahaharuddin dan Elsa Nur Wahyuni, 2008, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Darmono, 2001, Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Grasindo
- Delly, Merynda Deny Permata, 2010, Kajian Substansi Isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dan Pelaksanaannya Pada Pendidikan Dasar Kota Malang. Skripsi Tidak diterbitkan, Malang: FIP-UM
- Depdiknas, 2001, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: DEPDIKNAS DIRJENDIKDASMAN-DIREKTORAT DIKMENUM
- Hamid, Dedi, 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Durat Bahagia
- Hasbullah, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
- Lembaga Pemberdayaan Perpustakaan dan Informasi, 2000, Modul Pelatihan Pustakawan MI dan MTs Tahun 2000: Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Madrasah, Yogyakarta: kerja sama BEP, FKBI dan LPPI
- Slamet, 2002, Pendidikan Kecakapan Hidup: konsep dasar, Jurnal pendidikan dan kebudayaan, N0 37, Vol 8, Juli-2002, p:541-561
- Sumantri, 2006, Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Bandung: Remaja-Rosdakarya
- Widayati, C Sri, 2002, Reformasi Pendidikan Dasar: Menyiapkan Pribadi Berkualitas Menghadapi Persaingan Global, Jakarta: Grasindo

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2006, Pendidikan Kecakapan Hidup = Life Skill Education, Bandung: Alfabeta
- Bahaharuddin dan Elsa Nur Wahyuni, 2008, Teori Belajar dan Pembelajaran. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Darmono, 2001, Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Grasindo
- Delly, Merynda Deny Permata, 2010, Kajian Substansi Isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dan Pelaksanaannya Pada Pendidikan Dasar Kota Malang. Skripsi Tidak diterbitkan, Malang: FIP-UM
- Depdiknas, 2001, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: DEPDIKNAS DIRJENDIKDASMAN-DIREKTORAT DIKMENUM
- Hamid, Dedi, 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Durat Bahagia
- Hasbullah, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
- Lembaga Pemberdayaan Perpustakaan dan Informasi, 2000, Modul Pelatihan Pustakawan MI dan MTs Tahun 2000: Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Madrasah, Yogyakarta: kerja sama BEP, FKBI dan LPPI
- Slamet, 2002, Pendidikan Kecakapan Hidup: konsep dasar, Jurnal pendidikan dan kebudayaan, N0 37, Vol 8, Juli-2002, p:541-561
- Sumantri, 2006, Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Bandung: Remaja-Rosdakarya
- Widayati, C Sri, 2002, Reformasi Pendidikan Dasar: Menyiapkan Pribadi Berkualitas Menghadapi Persaingan Global, Jakarta: Grasindo